

# **Variables Affecting Minimum Wages in Regencies/Cities in West Java Province in 2023**

## **Peubah-peubah yang Memengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

Hariyol<sup>1</sup>, Nabiil Fauzaan<sup>1</sup>, Shabrina Shafwah Al-Rahmah<sup>1</sup>, Delia Fitri Audina<sup>1</sup>, Rakesha Putra Antique Yusuf<sup>1</sup>, Itasia Dina Sulvianti<sup>1</sup>, Much Fazrin Sepranjani Fatah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Statistics, IPB University, Indonesia

<sup>‡</sup>corresponding author: itiasiasu@gmail.com

### **Abstract**

The minimum wage is the lowest monthly wage in the form of basic wages and fixed benefits that can apply in the district/city areas. The minimum wage of West Java in 2023 is the third lowest among all provinces in Indonesia, which shows a significant gap compared to other regions and impacts the minimum wage in West Java. The government's determination of minimum wage directly impacts the welfare of workers and local economic growth. Factors that influence minimum wage include various economic and social aspects, such as Gross Regional Domestic Product (GRDP), labor force participation rate, decent living needs, inflation, open unemployment rate, economic growth, state budget, domestic investment, Consumer Price Index (CPI), and income per capita. This research aims to identify variables that significantly influence the minimum wage in West Java using multiple linear regression analysis methods. The data used comes from the Central Bureau of Statistics in 2023. The results show that the need for a decent living, the state budget, domestic investment, and the consumer price index have a positive and significant impact on minimum wage. The study proposes that the government can strive to improve these factors to increase the minimum wage in West Java.

**Keywords:** minimum wage, multiple regression analysis, West Java, worker

### **Abstrak**

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan upah bulanan terendah berupa upah pokok dan tunjangan tetap yang berlaku di daerah kabupaten/kota. Upah minimum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menduduki peringkat ketiga terendah di antara seluruh provinsi di Indonesia yang menunjukkan kesenjangan signifikan dibandingkan daerah lain dan berdampak terhadap besarnya UMK di Jawa Barat. Penetapan besarnya UMK oleh pemerintah memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Faktor-faktor yang memengaruhi UMK mencakup berbagai aspek ekonomi dan sosial, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan pendapatan per kapita. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peubah yang secara signifikan memengaruhi besarnya UMK di Jawa Barat menggunakan metode analisis regresi

linier berganda. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan hidup layak, anggaran pendapatan belanja negara, penanaman modal dalam negeri, dan indeks harga konsumen memengaruhi besarnya UMK signifikan secara positif. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah dapat mengupayakan peningkatan faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan besarnya UMK di Jawa Barat.

**Kata kunci:** analisis regresi berganda, Jawa Barat, pekerja, upah minimum

## 1. Pendahuluan

Upah/gaji bulanan terendah yang wajib diterima pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan mereka yang layak merupakan pengertian dari upah minimum. Upah minimum mencakup Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan oleh gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari bupati/walikota serta dewan pengupahan provinsi, ini berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 36 tahun 2021. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa upah yang ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat dan kemampuan perusahaan serta langkah nyata dalam mewujudkan penghidupan yang layak bagi pekerja. Menurut Putri (2022) menyatakan bahwa, upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2023 menduduki peringkat ketiga terendah di antara seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, DetikJabar (2022) melaporkan bahwa kaum buruh di beberapa kabupaten/kota mengalami kekecewaan dengan keputusan UMK Jawa Barat 2023 karena tidak sesuai dengan harapan dari rekomendasi yang diajukan pemerintah daerah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Nilai UMK secara umum dapat disebabkan oleh beberapa kondisi. Kusumaningrum dan Nurhayati (2023) menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negatif serta signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota. Artinya, saat PDRB meningkat maka akan memaksimalkan upah minimum kabupaten/kota, sedangkan apabila penawaran tenaga kerja meningkat maka upah minimum akan menurun. Selain itu, Utami (2019) mengungkapkan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) memiliki pengaruh positif dan inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Jawa Tengah. Bersales dan Lucagbo (2014) menyatakan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) dan pendapatan per kapita berdampak besar terhadap upah minimum.

Menurut Charysa (2013), pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah. Azahari et al. (2021) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap UMK. Selain itu, investasi melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memainkan peran penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan, karena dapat menambah stok modal dan meningkatkan produktivitas (Alvaro 2021). Secara teoritis, tingkat pengangguran terbuka memiliki

pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat upah di Indonesia (LIPI 2010).

Penelitian ini bertujuan menentukan model regresi linier berganda terbaik dan mengidentifikasi peubah-peubah yang berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat. Hal ini penting sebagai bahan kajian bagi pemerintah dalam menetapkan nilai UMK tahun berikutnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi pemerintah dalam menetapkan nilai UMK di Jawa Barat yang berkeadilan, sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya saing daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji isu terkait UMK di Indonesia.

## 2. Metodologi

### 2.1 Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sepuluh peubah penjelas dan satu peubah respons untuk tahun 2023, dengan total 27 amatan. Pemilihan peubah didasarkan pada penelitian sebelumnya dan preferensi pribadi peneliti untuk melakukan estimasi.

Tabel 1 Peubah-peubah

Kode	Peubah	Satuan	Referensi
Y	Upah Minimum Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	
X1	Kebutuhan Hidup Layak(KHL)	Juta Rupiah	(Utami 2019)
X2	Inflasi	Persen	(Utami 2019)
X3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	(LIPI 2010)
X4	Pertumbuhan Perekonomian	Persen	(Charysa 2013)
X5	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD)	Miliar Rupiah	(Azahari <i>et al.</i> 2021)
X6	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Triliun Rupiah	(Alvaro 2021)

Kode	Peubah	Satuan	Referensi
X7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	(Kusumaningrum dan Nurhayati 2023)
X8	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Poin	(Bersales dan Lucagbo 2014)
X9	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Miliar Rupiah	(Kusumaningrum dan Nurhayati 2023)
X10	Pendapatan per Kapita	Ribu Rupiah per Orang/Tahun	(Bersales dan Lucagbo 2014)

## 2.2 Metode Penelitian

Prosedur analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan eksplorasi pada data yang ada dengan membentuk *scatter plot*, histogram, dan matriks korelasi untuk menyeleksi peubah penjelas yang memiliki hubungan yang paling kuat dengan peubah respon.
- Melakukan pendugaan model awal regresi linear berganda dengan semua peubah penjelas terhadap peubah respons.

Regresi linear berganda adalah metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara peubah respons (Y) dan satu atau lebih peubah penjelas (X), yang dinyatakan dalam bentuk model berikut (Chatterjee dan Hadi 2006). Secara umum, hubungan antara satu peubah respons dan beberapa peubah prediktor dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \dots + \beta_p X_p + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan:

$Y$  = peubah respon

$X$  = peubah prediktor

$\beta_0$  = intersep

$\beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p$  = slop

$\varepsilon$  = error

$p$  = banyaknya parameter

- Melakukan pengujian untuk memeriksa multikolinearitas antar peubah penjelas dengan menggunakan nilai VIF.

Multikolinearitas terjadi ketika beberapa peubah penjelas memiliki korelasi satu sama lain. Salah satu metode untuk mendeteksi hubungan linear di antara peubah bebas dalam model adalah dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflation Factor) (Chatterjee dan Hadi 2006). Multikolinearitas dianggap ada jika nilai  $VIF > 10$  dan/atau nilai  $tolerance < 0.01$  (Susanti dan Saumi 2022). Beberapa cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas

meliputi menghapus peubah yang memiliki korelasi tinggi, menambah jumlah amatan, mentransformasikan data ke bentuk lain, atau menggunakan metode regresi yang lebih canggih (Kurniawan dan Yuniarto 2016).

- d. Mendeteksi amatan yang merupakan pencilan, titik leverage, dan amatan berpengaruh.

I. Pencilan

Suatu amatan dapat dikatakan sebagai pencilan apabila nilai mutlak sisaan terbakukannya lebih dari 2 ( $|r_i| > 2$ ).

II. Titik leverage

Suatu amatan merupakan titik *leverage* apabila nilai dari fungsi jarak antara amatan dengan nilai tengahnya lebih dari rata-rata jarak antar amatannya ( $h_{ii} > 2p/n$ ).

III. Amatan berpengaruh

Berdasarkan jarak *COOK*, amatan dapat dikatakan sebagai amatan berpengaruh apabila nilai  $D_i > F_{(p, n-p; 1-\alpha)}$  (Chatterjee dan Hadi 2006).

Keberadaan pencilan, titik leverage, dan amatan berpengaruh dapat dideteksi dengan beberapa cara di antaranya dengan metode grafis melalui *scatter plot*.

- e. Melakukan pendugaan model terbaik dengan metode stepwise. Metode ini melibatkan pemilihan peubah bebas berdasarkan korelasi parsial terbesar yang ada dalam model. Peubah yang telah dimasukkan ke dalam model bisa dikeluarkan kembali berdasarkan nilai F (parsial) sampai tidak ada lagi peubah yang memenuhi kriteria untuk ditambahkan atau dihilangkan. Metode stepwise adalah kombinasi dari dua teknik, yaitu analisis penyisihan mundur (backward procedure) dan pemilihan maju (forward procedure) (Andayani et al. 2016).
- f. Melakukan eksplorasi Kondisi Gauss-Markov dengan membuat grafik plot sisaan vs Y duga, plot sisaan vs urutan, dan normalitas dengan QQ-plot
- g. Melakukan uji asumsi sisaan berupa uji normalitas dan uji asumsi Gauss-Markov (nilai harapan sisaan sama dengan 0, heteroskedastisitas/ ragam sisaan homogen, dan kebebasan sisaan) terhadap model terbaik.

I. Nilai harapan sisaan sama dengan nol

Pengujian asumsi ini bertujuan untuk menentukan apakah penduga parameter bersifat bias atau tidak. Uji statistik yang digunakan dalam pengujian ini adalah uji-t. Hipotesis yang diterapkan adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Nilai harapan sisaan sama dengan nol [ $E(\varepsilon) = 0$ ]

$H_1$ : Nilai harapan sisaan tidak sama dengan nol [ $E(\varepsilon) \neq 0$ ]

II. Ragam sisaan homogen

Uji heteroskedastisitas/kehomogenan digunakan dalam model regresi untuk mendeteksi perbedaan variasi residual antara pengamatan satu dengan yang lainnya (Nurcahya et al. 2023). Uji statistik yang

diterapkan adalah uji studentized Breusch-Pagan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Ragam sisaan homogen [ $Var(\varepsilon) = \sigma^2$ ]

$H_1$ : Ragam sisaan tidak homogen [ $Var(\varepsilon) \neq \sigma^2$ ]

III. Sisaan saling bebas

Pengujian asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi antar amatan. Autokorelasi merupakan korelasi antara peubah gangguan satu dengan peubah gangguan lainnya. Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (Nurcahya et al. 2023).

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Sisaan saling bebas [ $E(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$ ]

$H_1$ : Sisaan tidak saling bebas [ $E(\varepsilon_i, \varepsilon_j) \neq 0$ ]

IV. Asumsi Normalitas Sisaan

Pengujian asumsi ini dilakukan untuk menentukan apakah residual berdistribusi normal. Uji statistik yang digunakan adalah uji normalitas Shapiro-Wilk, yang diterapkan untuk memeriksa distribusi data acak pada sampel kecil dengan ukuran kurang dari 50 sampel. Data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0.05 (Nurcahya et al. 2023). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Sisaan berdistribusi normal

$H_1$ : Sisaan tidak berdistribusi normal

h. Menguji kelayakan model terbaik berdasarkan koefisien determinasi, pengujian F simultan, dan pengujian t parsial.

i. Uji koefisien determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menilai besarnya peubah independen yang dapat menjelaskan variasi dalam peubah dependen dan dinyatakan dalam persentase antara 0% hingga kurang dari 100%.

ii. Uji F (Uji Simultan)

Uji ini mengevaluasi pengaruh bersama-sama dari peubah independen terhadap peubah dependen. Jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0.05, maka peubah independen secara signifikan mempengaruhi peubah dependen secara simultan.

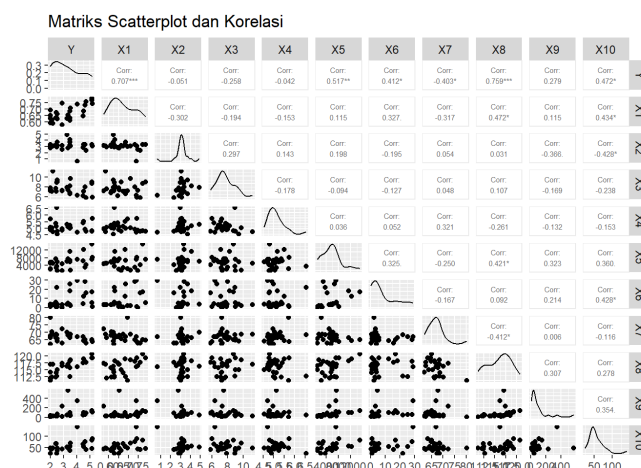
iii. Uji-t (Uji Parsial)

Uji ini mengukur pengaruh setiap peubah independen secara individu terhadap peubah dependen. Jika nilai t-hitung melebihi nilai t-tabel dan signifikansinya kurang dari 0.05, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari peubah independen terhadap peubah dependen secara individu.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Eksplorasi Data

Eksplorasi data dilakukan dengan membentuk *scatter plot*, histogram, serta matriks korelasi yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 *Scatter plot*, histogram, dan matriks korelasi

Tanda \*(bintang) pada matriks di atas artinya terdapat nilai korelasi antara dua peubah. Matriks pada Gambar 1 menunjukkan peubah-peubah yang memiliki korelasi yang lebih kuat terhadap respons Y (Upah Minimum Kabupaten/Kota), yakni X1 (Kebutuhan Hidup Layak), X5 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), X6 (Penanaman Modal Dalam Negeri), X7 (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), X8 (Indeks Harga Konsumen), dan X10 (Pendapatan Per Kapita). Sementara itu, peubah X2 (Inflasi), X3 (Tingkat Pengangguran Terbuka), X4 (Pertumbuhan Perekonomian), dan X9 (Produk Domestik Regional Bruto) memiliki korelasi yang lebih lemah dan telah terwakili oleh peubah penjelas yang lainnya sehingga dapat dihilangkan untuk kemudian diperiksa model.

#### 3.2 Pendeteksian Multikolinearitas

Pendeteksian multikolinearitas yang dilakukan pada peubah-peubah penjelas yang telah melewati proses reduksi peubah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Pendeteksian Multikolinearitas

Kode	Peubah	Nilai VIF
X1	Kebutuhan Hidup Layak(KHL)/orang	1,721
X5	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD)	1,534
X6	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	1,405

X7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1,271
X8	Indeks Harga Konsumen (IHK)	1,766
X10	Pendapatan Perkapita	1,521

---

Hasil analisis tersebut tidak ditemukan tanda-tanda multikolinearitas dalam model regresi, yang biasanya terjadi ketika nilai VIF > 10. Maka dari itu, tidak perlu melakukan penyaringan peubah pada model ini sehingga akan dilanjutkan ke tahap analisis data berikutnya.

### 3.3 Pendeteksian Pencilan, Titik Leverage, dan Amatan Berpengaruh

#### I. Pencilan

Suatu amatan dapat dikatakan sebagai pencilan apabila nilai mutlak sisaan terbakukannya lebih dari 2 ( $|r_i| > 2$ ). Data ini memiliki dua titik observasi yang terdeteksi sebagai sebuah pencilan, yaitu amatan ke-14 dengan nilai  $r_i$  nya 2.473 dan amatan ke-27 dengan nilai  $r_i$  nya -2.049.

#### II. Titik Leverage

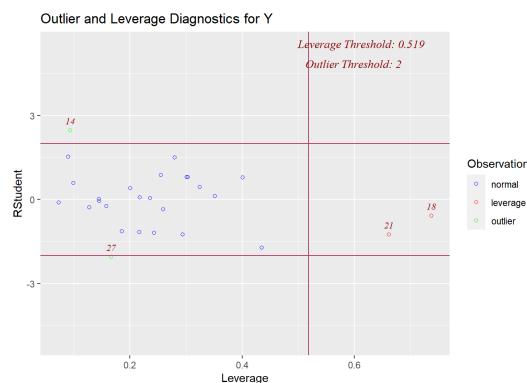
Suatu amatan dapat dikatakan sebagai titik leverage apabila nilai dari fungsi jarak antara amatan dengan nilai tengahnya lebih dari rata-rata jarak antar amatannya ( $h_{ii} > 2p/n$ ). Berdasarkan data tersebut, terdapat dua titik observasi yang termasuk sebagai titik leverage pada data, yaitu amatan ke-18 dengan nilai  $h_{ii}$  sebesar 0.7369 dan amatan ke-21 dengan nilai  $h_{ii}$  sebesar 0.1580.

#### III. Amatan Berpengaruh

Jarak COOK (*COOK's distance*) merupakan salah satu ukuran dalam menentukan amatan berpengaruh. Jarak COOK mengukur selisih antara koefisien regresi yang diperoleh dari data lengkap dan yang diperoleh dengan menghapus observasi ke- $i$  (Chatterjee dan Hadi 2006). Berdasarkan metode Jarak COOK, amatan dapat dikatakan sebagai amatan berpengaruh apabila nilai  $D_i > F_{(p, n-p; 1-\alpha)}$ . Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa amatan ke-16 dan ke-21 termasuk sebagai amatan berpengaruh dengan nilai DFFITS-nya -1.5018 dan -1.7359.

Tahap ini dilakukan pengecekan pada dua data, yaitu data ketika titik leverage dan pencilan dikeluarkan dari data. Hasilnya didapatkan *residual*nya sebesar 3.0502, *multiple R-squared* sebesar 0.8816, *adjusted R-squared* sebesar 0.8398 yang merupakan model terbaik dengan mengeluarkan amatan 14, 18, dan 27.





Gambar 2 Amatan berpengaruh dengan pencilan dan titik leverage

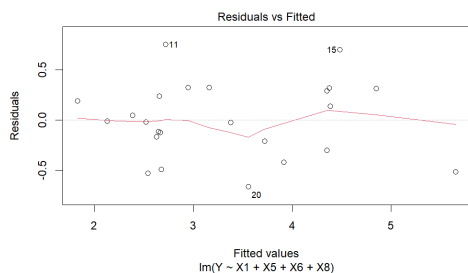
### 3.4 Pemilihan Model Terbaik

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memilih model terbaik. Salah satunya adalah metode *stepwise*. Metode *stepwise* digunakan untuk memilih dan mengeliminasi peubah dalam model secara bertahap berdasarkan kriteria tertentu, menghasilkan model dengan empat peubah penjelas: X1 (Kebutuhan Hidup Layak per orang), X5 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), X6 (Penanaman Modal Dalam Negeri), dan X8 (Indeks Harga Konsumen). Dengan demikian, model regresi linear berganda terbaik dapat disimpulkan sebagai berikut.

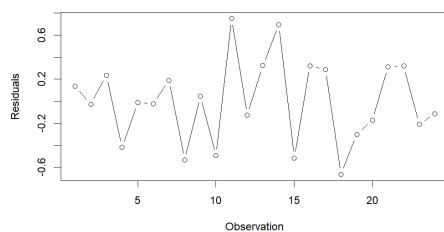
$$\hat{Y} = -23.220 + 7.909X_1 + 0.0000588X_5 + 0.01838X_6 + 0.1788X_8 + e \quad (2)$$

### 3.5 Eksplorasi Kondisi Gauss-Markov dan Normalitas

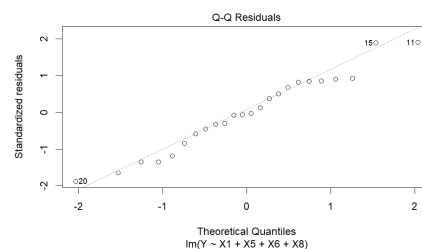
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, asumsi nilai harapan sisaan sama dengan nol dan ragam sisaan homogen dapat dilihat melalui plot sisaan vs Y duga yang tersaji pada Gambar 3. Sisaan menyebar di sekitar 0 sehingga nilai harapan galat sama dengan nol serta lebar pita sama untuk setiap nilai dugaan sehingga ragam homogen. Plot sisaan vs urutan menunjukkan asumsi sisaan saling bebas dapat dilihat pada Gambar 4. Plot tersebut menunjukkan bahwa tebaran tidak berpola sehingga sisaan saling bebas dan model pas. Selanjutnya Normalitas sisaan dengan Q-Q-plot, asumsi sisaan menyebar normal dapat dilihat pada Gambar 5. Titik-titik data pada Q-Q-plot cukup dekat dengan garis. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi sisaan mirip dengan sebaran normal.



Gambar 3 Plot Sisaan vs Y duga



Gambar 4 Plot sisaan vs urutan



Gambar 5 Normalitas Sisaan

### 3.6 Uji Asumsi dan Normalitas

Berdasarkan Tabel 3 yang menampilkan hasil pengujian asumsi normalitas dan Gauss-Markov pada residual, diperoleh nilai *p-value* pada uji-t, uji *Breusch-Pagan*, dan uji *Durbin-Watson* yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Ini mengindikasikan bahwa asumsi nilai harapan nol, homoskedastisitas, dan ketidakhubungan antar residual telah terpenuhi. Selain itu, hasil uji normalitas menggunakan uji *Shapiro-Wilk* juga menunjukkan nilai *p-value* lebih besar dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

Tabel 3 Hasil uji asumsi sisaan

Asumsi Sisaan	Uji Formal	<i>p-value</i>
Normalitas	<i>Shapiro-Wilk Normality Test</i>	0,616
$E[\varepsilon_i] = 0$	<i>t-test</i>	1,000
$E[\varepsilon_i^2] = Var[\varepsilon] = \sigma^2$	<i>Breusch-Pagan test</i>	0,459
$E[\varepsilon_i \varepsilon_j] = 0, i \neq j$	<i>Durbin-Watson test</i>	0,873

### 3.7 Pengujian Kelayakan Model

Model yang telah diperoleh memiliki nilai koefisien determinasi berdasarkan *Adjusted R-Squared* sebesar 0.8474. Hal ini dapat diartikan bahwa sekitar 84,74% keragaman dalam peubah respons dapat dijelaskan oleh peubah penjelas dalam model regresi yang telah disesuaikan dengan jumlah peubah penjelas yang ada dalam model. Artinya, model regresi ini dapat menjelaskan sebagian besar keragaman dalam peubah respons.

Berdasarkan pengujian F-simultan pada model dan t parsial pada setiap peubahnya diperoleh nilai F statistik model sebesar 32.92 dan *p-value* sebesar  $2.661 \times 10^{-8}$ .

Tabel 4 Hasil pengujian t parsial pada setiap peubah

Peubah	t statistik	<i>p-value</i>
X1	-4,390	0,000315

X5	1,931	0,068572
X6	1,744	0,097372
X8	3,847	0,001086

Jika mengacu pada kriteria ketika  $H_0$  ditolak saat  $p\text{-value} < 0.05$  pada tingkat signifikansi 5%, dapat dinilai keberterimaan model serta signifikansi setiap peubah terhadap model. Hasil uji F simultan menunjukkan  $p\text{-value} < 0.05$  yang menandakan bahwa model secara keseluruhan layak digunakan atau memiliki pengaruh bersama-sama terhadap respons atau setidaknya satu peubah memiliki pengaruh signifikan terhadap respons. Sementara itu, uji t parsial menunjukkan bahwa peubah X1 dan X8 berpengaruh secara langsung terhadap model ( $p\text{-value} < 0.05$ ), sedangkan peubah X5 dan X6 tidak signifikan terhadap model. Meskipun demikian, hasil uji t parsial yang tidak signifikan tidak mengurangi keseluruhan signifikansi model yang dinilai melalui uji F simultan. Oleh karena itu, model tetap dapat dipakai untuk memprediksi peubah respons.

### 3.8 Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, terdapat beberapa peubah yang memengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 yang dijelaskan melalui model regresi linear berganda berikut.

$$\hat{Y} = -23.220 + 7.909X_1 + 0.0000588X_5 + 0.01838X_6 + 0.1788X_8 + e \quad (3)$$

Keterangan :  $X_1$  = Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

$X_5$  = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

$X_6$  = Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

$X_8$  = Indeks Harga Konsumen (IHK)

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang buruh/tenaga kerja lajang untuk hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Menurut Sayyidah dan Effendi (2020), KHL memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota. Temuan ini konsisten dengan hasil model yang diperoleh, di mana KHL menjadi salah satu faktor yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Dengan demikian, setiap peningkatan satu unit KHL dan faktor penjelas lainnya yang tetap, akan meningkatkan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar

7.909 satuan. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan KHL dapat menyebabkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Selain Kebutuhan Hidup Layak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga memiliki dampak terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota. APBD suatu daerah dapat berasal dari berbagai sumber pendapatan yang menjadi pemasukan bagi daerah tersebut. Ini menunjukkan pentingnya setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi lokalnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, yang kemudian berpengaruh pada peningkatan upah minimum (Azahari et al. 2021). Hasil penelitian Mirsan et al. (2019) dan Tahar dan Zakhya (2011) mendukung pandangan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Upah Minimum Regional. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023, APBD merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif, meskipun tidak signifikan, terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota. Ini berarti bahwa setiap kenaikan satu unit APBD dan faktor lain yang konstan akan menyebabkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar 0.0000588 satuan. Dengan demikian, peningkatan APBD dapat berkontribusi pada peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Selain Kebutuhan Hidup Layak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), faktor lain yang mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMDN berpotensi menciptakan lapangan kerja baru yang meningkatkan permintaan tenaga kerja, sehingga meningkatkan daya tawar pekerja (Fitriana dan Mufid 2021). Hutapea dan Pasaribu (2019) juga mengemukakan bahwa PMDN dapat meningkatkan produktivitas melalui transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan modernisasi infrastruktur, yang dapat mendorong kenaikan UMK sebagai strategi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja berkompeten. Nurhakim (2021) menegaskan bahwa PMDN memiliki dampak positif terhadap UMK di Indonesia, terutama melalui peningkatan permintaan tenaga kerja dan produktivitas. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa PMDN memengaruhi UMK secara positif namun tidak signifikan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Dengan kata lain, setiap kenaikan satu unit PMDN dan faktor lain yang konstan akan menyebabkan peningkatan UMK sebesar 0.01838 satuan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan PMDN dapat berkontribusi pada peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah sebuah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode dasar (Purwanto dan Fahri 2021). Menurut Moelanoto dan Dyah (2020), IHK merupakan alat ukur statistik yang mencerminkan fluktuasi harga barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil model yang diperoleh, IHK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023. IHK digunakan sebagai dasar untuk menghitung penyesuaian UMK secara tahunan, dengan tujuan menjaga daya beli pekerja di tengah kenaikan harga barang dan jasa (Setyawan dan Sari 2022). Pandangan lain

dari Rahayu dan Manurung (2019) menunjukkan bahwa kenaikan UMK yang mengikuti IHK diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup minimum. Secara keseluruhan, Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi salah satu faktor penjelas yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Dengan kata lain, setiap kenaikan satu unit IHK dan faktor lain yang tetap akan mengakibatkan peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar 0.1788 satuan. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan IHK berpotensi meningkatkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 dipengaruhi oleh Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri (APBD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Peubah-peubah ini secara bersama-sama dianggap dapat memberikan pemodelan terbaik dalam menggambarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

Model terbaik ini tidak seluruhnya menggambarkan signifikansi atau pengaruh nyata dari setiap peubah penjelasnya. Peubah yang memiliki signifikan dalam menetapkan UMK adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Sehingga perlu dipertimbangkan peubah mana yang harus diperhatikan lebih dahulu. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memaksimalkan model, sehingga kedepannya dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam mengarahkan upaya yang efektif dan efisien dalam melakukan penanganan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat.

#### Daftar Pustaka

- [LIPI] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2010. *Analisis Tingkat Upah & Produktivitas Tenaga Kerja*. Jakarta: LIPI Press.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 2021.
- Alvaro R. 2021. Pengaruh investasi, tenaga kerja, serta ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Budget*. 6(1):114-131.
- Andayani NN, Aqil M, Syuryawati. 2016. Aplikasi model regresi stepwise dalam penentuan hasil jagung putih. *Jurnal Informatika Pertanian*. 25(1):21-28.
- Andrianto R, Irawan F. 2023. Implementasi metode regresi linear berganda pada sistem prediksi jumlah tonase kelapa sawit di PT. Paluta Inti Sawit. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(1):2926–2936. DOI:10.31004/jptam.v7i1.5658.

- Azhari M, Zulfa A, Murtala M. 2021. Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia*. 5(1):81. DOI:10.29103/j-mind.v5i1.3427.
- Bersales LGS, Lucagbo MD. 2014. Determinants of regional minimum wages in the Philippines. *The Philippine Statistician*. 63(2):71-85.
- Charysa NN. 2013. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum regional di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011. *Economics Development Analysis Journal*. 2(4):277-285. DOI:10.15294/edaj.v2i4.2489.
- Chatterjee S, Hadi AS. 2006. *Regression Analysis by Example*. New Jersey [us]: John Wiley & Sons.
- DetikJabar. 2022 Des 11. Lika-liku penetapan UMK 2023 di Jawa Barat. Detik.com. Bisnis. Diakses 2024 Apr 28. <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6454843/liku-liku-penetapan-umk-2023-di-jawa-barat/2>.
- Fitriana R, Mufid A. 2021. The impact of domestic investment on wages and employment: evidence from Indonesia. *Economics and Development Journal*. 20(1): 1-17.
- Hutapea M, Pasaribu SM. 2019. The effect of domestic investment on wages in Indonesia: evidence from panel data analysis. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. 13(2): 229-238.
- Kurniawan R, Yuniarto B. 2016. *Analisis Regresi: Dasar dan Penerapannya dengan R*. Kencana: Jakarta.
- Kusumaningrum RR dan Nurhayati SF. 2023. Analisis pengaruh produk domestic regional bruto, indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rata-rata pengeluaran perkapita terhadap upah minimum kabupaten/kota di Karesidenan Pekalongan tahun 2017-2021. *Jurnal Mirai Management*. 8(1):510-517.
- Mirsan MA, Hamzah N, Sjufri M. 2019. Pengaruh investasi, PDRB perkapita dan pendapatan asli daerah terhadap derajat kemandirian fiskal (studi kasus Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2(2):83-98.
- Moelanoto M, Dyah SR. 2020. The impact of inflation on minimum wages in Indonesia: a case study of the garment industry. *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis*. 11(1):1-10.
- Nurchaya WA, Arisanti NP, Hanandhika AN. 2023. Penerapan uji asumsi klasik untuk mendeteksi kesalahan pada data sebagai upaya pelanggaran pada asumsi klasik. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1(12):472-481.
- Nurhakim M. 2021. *Ekonomi Pembangunan Indonesia: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 312.

Purwanto A, Fahri S. 2021. The impact of inflation on wages and employment: evidence from Indonesia. *Economics and Development Journal*. 20(1): 1-17.

Putri AMH. 2022. Cek! daftar UMP 2023, provinsi mana yang tertinggi?. Cnbcindonesia.com. Research. Diakses 2024 Mei 18. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221129131735-128-392110/cek-daftar-ump-2023-provinsi-mana-yang-tertinggi>.

Rahayu S, Manurung M. 2019. The effect of domestic investment on wages in Indonesia: evidence from panel data analysis. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. 13(2):229-238.

Sayyidah, Effendi M. 2020. Pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak terhadap upah minimum provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. 3(2):373-389.

Setyawan D, Sari RA. 2022. The Impact of Inflation on Minimum Wages in Indonesia: Evidence from Panel Data Analysis. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. 16(2): 229-238.

Susanti I, Saumi F. 2022. Penerapan metode analisis regresi linear berganda untuk mengatasi masalah multikolinearitas pada kasus indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Matematika dan Terapan*. 4(2):10-17.

Tahar A, Zakhiya M. 2011. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 12(1):88-99.

Utami KS. 2019. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017 [skripsi]. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.